



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**

**P-ISSN : 2621-0312**

**E-ISSN : 2657-1560**

**Vol. 5, No. 2 Tahun 2022**

**DOI : 10.21043/politea.v5i2.17203**

---

## Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab – Israel: Analisis Rasionalitas Kebijakan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab

Sidiq Ahmadi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia  
sidiqahmadi@umy.ac.id

Jasmine Armantyas Safannah Bumi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia  
jasmine.a.isip18@mail.umy.ac.id

### **Abstract**

*The foreign policy of the United Arab Emirates (UAE) to normalize relations with Israel in 2020 has caused controversy and sparked widespread criticism, especially from Muslim countries, because it is considered to have violated the 2002 Arab Peace Initiative agreement and betrayed a commitment to support Palestine. This article is aimed to analyze the rationality of the UAE's decision mentioned above. This is qualitative research with library research methods. The analysis was carried out using the Rational Actor Model from Graham T Allison. This research found that the decision of the United Arab Emirates to normalize relations with Israel is rational. This option is calculatedly the most beneficial for achieving the United Arab Emirates' national interests, namely, increasing its defense and security sector from Iranian threats, maintaining economic stability, and strengthening its position in the international system.*

*Keywords: United Arab Emirates, Israel, foreign policy, national interest*

### **Abstrak**

Kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 telah menimbulkan kontroversi dan memicu kecaman secara luas terutama dari negara-negara muslim karena dianggap telah langgar perjanjian Arab Peace Initiative tahun 2002 dan mengkhianati komitmen mendukung Palestina. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas kebijakan politik luar negeri Uni Emirat tersebut

dengan menggunakan metode penelitian pustaka dan analisis secara kualitatif menggunakan Model Aktor Rasional dari Graham T Allison. Penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa keputusan Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel adalah keputusan yang rasional. Pilihan tersebut adalah pilihan yang secara kalkulatif paling menguntungkan untuk mencapai kepentingan nasional Uni Emirat Arab yaitu, meningkatkan sektor pertahanan dan keamanannya dari ancaman Iran, menjaga stabilitas perekonomian, dan memperkuat posisinya dalam sistem internasional.

Kata kunci: Uni Emirat Arab, Israel, kebijakan luar negeri, kepentingan nasional

## Pendahuluan

Pada 13 Agustus 2020, Uni Emirat Arab melalui Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri UEA, mengumumkan bahwa Uni Emirat Arab akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Gargash menekankan bahwa hal ini ditujukan untuk menghentikan wacana perluasan wilayah yang kerap diserukan oleh Israel (AMN News, 2020). Wilayah yang dimaksud adalah perluasan wilayah Israel ke daerah West Bank, Palestina.

Kedua negara tersebut mengadakan pertemuan di the White House, Amerika Serikat, untuk penandatanganan perjanjian pada 16 September 2020, dimana Uni Emirat Arab diwakili oleh Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan selaku Menteri Luar Negeri dan Israel dengan Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri dari Israel. Kedua pemimpin tersebut memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan yang ditandai dengan jalinan hubungan diplomatik oleh kedua negara tersebut. Perjanjian ini ditengahi oleh Donald Trump selaku makelar atau perantara dan dijuluki sebagai *Abraham Accords* (Alterman, 2020). Adapun, pelaksanaan normalisasi hubungan ini merupakan rekonsiliasi negara Arab-Israel pertama sejak perjanjian damai Israel-Jordania pada tahun 1994 (Barron, 2020).

Normalisasi hubungan tersebut berpotensi untuk memperluas kerangka kerjasama yang sebelumnya sudah ada, dan mencapai sejumlah kepentingan nasional. Berikut ini adalah beberapa hal yang dijangkau dari *Abraham Accords*:

1. Terjalinnnya Perdamaian, Hubungan Diplomatik dan Normalisasi
2. Pendirian Kedutaan

3. Perdamaian dan Stabilitas
4. Kerjasama dan Kesepakatan di Bidang Lain: keuangan dan investasi; penerbangan sipil; visa dan layanan konsuler; inovasi; perdagangan dan hubungan ekonomi; kesehatan; ilmu pengetahuan; teknologi dan penggunaan luar angkasa secara damai; pariwisata, budaya, dan olahraga; energi; lingkungan; pendidikan; perbaikan maritim; telekomunikasi, pasca pertanian, dan ketahanan pangan; air; kerjasama hukum.
5. Agenda Strategis untuk Timur Tengah
6. Hak dan Kewajiban lainnya

Uni Emirat Arab beserta Israel berupaya untuk menciptakan era baru di Timur Tengah, dengan cara memajukan kepentingan nasional masing-masing negara melalui jalinan hubungan diplomatik resmi. Hal ini dikarenakan, sebelumnya kedua negara telah melaksanakan sejumlah kerangka kerjasama yang sifatnya berlangsung secara tertutup, contohnya seperti: pembukaan kantor diplomatik Israel di Abu Dhabi untuk acara IRENA, kunjungan pejabat Israel ke UEA, pelaksanaan perdagangan melalui negara ketiga sebagai perantara, dan bahkan kegiatan pelatihan militer bersama. Oleh karena itu, terdapat indikasi bahwa UEA dan Israel sama-sama memiliki keinginan yang besar untuk melakukan normalisasi hubungan.

Di lain sisi, keputusan Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel menimbulkan sejumlah kontroversi. Uni Emirat Arab telah melanggar perjanjian Arab Peace Initiative tahun 2002 yang telah ditandatangani dan disepakati negara-negara Arab termasuk oleh UEA sendiri. Perjanjian tersebut mengatur bahwa negara-negara Arab akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, apabila kondisi berikut sudah tercapai:

1. Israel menarik diri secara penuh dari seluruh wilayah Palestina, seperti pada tahun 1967, termasuk: Dataran Tinggi Golan Suriah dan wilayah Lebanon Selatan;
2. Pencapaian solusi yang adil untuk masalah pengungsi Palestina sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 194;

3. Dan pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat di wilayah Palestina yang diduduki sejak 4 Juni 1967 di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya (The Guardian, 2002).

Apabila kita telaah, sejumlah kondisi yang disebutkan di atas belum sepenuhnya tercapai. Itulah mengapa tindakan normalisasi yang dilakukan UEA dianggap secara tidak langsung telah melenceng dari prinsip-prinsip negara Arab dan menimbulkan kekecewaan besar di kalangan masyarakat Palestina.

Kendati begitu, kebijakan Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel patut dikalkulasi, agar mengetahui apakah tindakannya merupakan keputusan yang rasional guna mencapai kepentingan nasionalnya. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui mengapa Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020.

Normalisasi hubungan antara UEA dan Israel telah dibahas dalam setidaknya dua penelitian. Yang pertama, (Tahmi, Rosyidin, & Alfian, 2022) menyimpulkan bahwa keputusan UEA untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel adalah karena didorong oleh kepentingan nasionalnya yaitu kepentingan politik keamanan, ekonomi, dan perdamaian. Kesimpulan senada juga disampaikan oleh Wicaksono dalam artikelnya “The Normalization of UAE-Israel Relations” bahwa kebijakan normalisasi dengan Israel diambil oleh UEA untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang meliputi kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi. Selain itu dalam artikel tersebut juga ditemukan adanya perbedaan respons dari dunia Islam terhadap keputusan normalisasi tersebut berupa respons positif dan negatif. (Wicaksono, 2020)

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut apakah keputusan UEA untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel merupakan pilihan yang rasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan model aktor rasional dalam pengambilan keputusan luar negeri sebagaimana dikemukakan oleh Graham T Allison (1971). Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka untuk mendapatkan data-data tentang latar belakang pengambilan keputusan normalisasi

dengan Israel. Secara deskriptif analisis penulis mengidentifikasi kepentingan nasional yang terkait dengan keputusan tersebut, mengidentifikasi pilihan kebijakan yang tersedia, dan melakukan analisis untung-rugi dari setiap pilihan yang tersedia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### *Teori Model Aktor Rasional*

Pada bukunya, *The Essence of Decision Making*, Graham T. Allison berupaya untuk menelaah krisis Misil Kuba dengan menggunakan tiga model pemutusan pengambilan kebijakan luar negeri, salah satunya yaitu adalah model aktor rasional. Model ini menitikberatkan negara sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan luar negeri, dan mengusung asumsi bahwa negara merupakan aktor yang rasional saat mengambil berbagai keputusan luar negeri tersebut. Allison mendefinisikan “rasional” sebagai suatu tindakan yang konsisten dan memaksimalkan peluang yang ada pada batasan-batasan yang ditentukan (Allison, 1971). Hal ini didasarkan pada perilaku negara yang secara konsisten berorientasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sehingga, melalui perilaku tersebut, negara tentu akan mengambil opsi kebijakan yang paling menguntungkan bagi kemaslahatan negaranya, maka dari itu disebut sebagai aktor yang rasional.

Selain mengusung asumsi rasionalitas, model Aktor Rasional juga digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses pengambilan keputusan politik luar negeri, yaitu dengan membandingkan berbagai opsi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional tertentu, dan kemudian mengkalkulasikan masing-masing untung dan rugi dalam rangka memilih opsi dengan *value* tertinggi (Mas'oeed M. , 1990) . Dalam konteks ini, proses pengambilan kebijakan terbagi menjadi empat tahap, yaitu: *goals and objectives*, *alternatives*, *consequences*, dan *choice* (Allison, 1971).

#### *1. Goals and Objectives*

Pada tahap pertama para pengambil keputusan akan terlebih dahulu menentukan tujuan dan objektif (kepentingan nasional) yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, ancaman dan peluang yang terjadi pada sistem internasional mempengaruhi negara untuk menentukan

*goals and objectives* tersebut (Allison, 1971, p. 33). Selain itu, para aktor pembuat kebijakan akan mempertimbangkan keuntungan, kegunaan atau preferensi dalam rangka mengetahui peluang apa saja yang akan terjadi jika keputusan tersebut diambil (Allison, 1971).

## 2. *Alternatives*

Kemudian, pada tahap kedua para aktor harus memilih dari berbagai alternatif kebijakan yang telah dirincikan. Allison menyebutkan bahwa sejumlah opsi alternatif tersebut direpresentasikan sebagai *decision tree*, yang mana fokus pada solusi-solusi untuk merespon permasalahan yang ada (*goals and objectives*) (Allison, 1971, pp. 29–30). Adapun, sejumlah opsi alternatif tersebut harus diurutkan berdasarkan skala prioritas dari yang paling tinggi-rendah. Adapun, kebijakan tersebut berada dalam urutan tertentu, dimulai dari preferensi paling tinggi hingga rendah.

## 3. *Consequences*

Pada tahap ketiga, para aktor akan mengidentifikasi konsekuensi dari masing-masing alternatif, dengan cara menjabarkan masing-masing untung dan rugi yang akan diperoleh apabila kebijakan tersebut diambil. Di sini, aktor negara akan memiliki asumsi dan perspektif yang berbeda-beda (tergantung pada kapasitas wawasan masing-masing) terkait seberapa akurat konsekuensi tersebut dalam rangka menjangkau kepentingan nasional yang ada. Kendati begitu, aktor negara dianggap sebagai aktor yang rasional, karena menempatkan pemenuhan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam konteks perumusan kebijakan luar negeri.

## 4. *Choices*

Akhirnya, pada tahap terakhir, para aktor akan memilih salah satu dari alternatif tersebut, dengan pertimbangan berupa kepentingan nasional yang ingin dicapai, serta untung-rugi dari kebijakan tersebut.

## *Dinamika Hubungan Uni Emirat dengan Israel*

Sebelum melakukan normalisasi hubungan, hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel berlangsung cukup pasif. Dalam konteks ini, Uni Emirat Arab memutuskan untuk tidak mengakui kedaulatan Israel, dalam rangka mematuhi Arab Peace Initiative yang merupakan hasil dari kesepakatan negara-negara yang tergabung di Liga Arab.

Kendati begitu, diketahui bahwa serangkaian kerjasama telah dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Israel secara tersembunyi, bahkan sebelum keduanya melakukan normalisasi hubungan. Serangkaian kerjasama tersebut meliputi: perdagangan, energi, olahraga, dan keamanan. Di bawah ini merupakan segenap rangkuman dari berbagai kegiatan yang menandai adanya hubungan baik antara uni Emirat Arab dengan Israel sebelum aksi normalisasi.

Pada tahun 2015, pemerintah Uni Emirat Arab memberikan izin kepada Israel untuk membuka kantor diplomatik di Abu Dhabi (The Washington Institute, 2015). Akan tetapi, kantor diplomatik ini secara khusus hanya untuk memfasilitasi keanggotaan Israel pada agenda International Renewable Energy Agency (IRENA). Diketahui bahwa Israel sudah lama berpartisipasi secara aktif pada agenda ini, namun belum memiliki kantor resmi. Sehingga, pemberian izin atas pembukaan kantor diplomatik tersebut bertujuan untuk memudahkan partisipasi Israel kedepannya.

Pada tahun berikutnya, diketahui bahwa duta besar Israel untuk PBB mengunjungi Dubai, UEA untuk menghadiri konferensi pembangunan dalam kapasitasnya sebagai ketua Komite Hukum PBB (The Jerusalem Post, 2016). Kunjungan ini dilakukan secara diam-diam dan dilengkapi dengan pengamanan yang ketat, agar tidak menimbulkan kecaman dari masyarakat UEA.

Pada bulan Oktober 2018, Menteri Kebudayaan dan Olahraga Israel, Miri Regev melakukan visitasi kenegaraan dengan mengunjungi Masjid Agung Sheikh Zayed di Abu Dhabi (Jewish Virtual Library, 2022). Adapun, aksi visitasi ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama yang dilakukan oleh seorang pejabat Israel ke negara Arab. Pada masa kunjungannya, lagu kebangsaan Israel juga dimainkan di Dubai, UEA ketika salah satu atlet

Israel mendapatkan medali emas pada suatu turnamen Judo (The Times of Israel, 2018). Tidak lama setelah itu, Menteri Komunikasi Israel, Ayoub Kara, juga melakukan visitasi ke Uni Emirat Arab.

Adapun, serangkaian kerjasama pada sektor ekonomi juga telah berlangsung antara kedua negara. Dalam konteks ini, kerjasama ekonomi yang dimaksud meliputi hal-hal seperti: ekspor-impor, serta kesepakatan bisnis antara perusahaan yang mengimplementasikan proyek di UEA dan Israel (Zaga, 2018). Adapun, perusahaan-perusahaan Israel yang terlibat dalam kesepakatan bisnis tersebut seringkali teregistrasi di bawah perusahaan lain di negara ketiga. Di lain sisi, produk-produk yang diekspor dari Israel menuju UEA meliputi: peralatan medis, telekomunikasi, bahan baku, produk pertahanan, mesin dan rekayasa, serta konsultasi dan produk terkait pertanian dan makanan (Middle East Eye, 2016).

Salah satu contoh dari skema kerjasama yang pernah berlangsung adalah pada tahun 2008 ketika AGT International, perusahaan Israel, dikontrak oleh pemerintah Abu Dhabi untuk memasang pagar elektronik, sistem sensor dan kamera untuk memantau perbatasan dan mengamankan ladang minyak dan gas alam di UEA (al Ittihad, 2008).

Selain itu, diketahui bahwa Uni Emirat Arab dan Israel juga melakukan serangkaian kerjasama pada bidang keamanan. Diketahui bahwa, Uni Emirat Arab dan Israel seringkali berpartisipasi pada latihan militer multilateral dan pertukaran intelijen dan peralatan militer (Haaretz, 2013). Tidak hanya itu, UEA dikabarkan telah melaksanakan kerjasama trilateral rahasia dengan Amerika Serikat dan Israel yang digelar pada 17 Desember 2019 (Axios, 2020). Kerjasama trilateral ini berupa koordinasi antar ketiga negara untuk meningkatkan keamanannya dari Iran. Namun, kerjasama ini juga merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menciptakan hubungan baru antara negara-negara Arab dengan Israel. Hal ini ditandai dengan objektif lain yang ingin dicapai dari kerjasama ini, yaitu berupa pakta non-agresi antara Uni Emirat Arab dengan Israel (Axios, 2020). Sehingga, dapat dikatakan bahwa kerjasama trilateral ini merupakan cikal bakal dari normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel.

Akhirnya, Pada tanggal 13 Agustus 2020, Uni Emirat Arab dan Israel sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan kedua negara secara penuh. Adapun, aksi normalisasi ini ditengahi oleh Amerika Serikat (Donald Trump), dan dijuluki sebagai Abraham Accords. Pelaksanaan normalisasi ini akan memungkinkan Uni Emirat Arab dan Israel untuk meresmikan hubungan kedua negara dan memperluas kerangka kerjasama yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Serangkaian kerangka kerjasama tersebut seperti: investasi, pariwisata, penerbangan langsung, keamanan, telekomunikasi, teknologi, energi, kesehatan, budaya, lingkungan, pembukaan kantor kedutaan di kedua negara, dan bidang lain yang saling menguntungkan (United States Institute of Peace, 2020). Selain itu, Israel juga memutuskan untuk menunda rencananya dalam melakukan aneksasi di wilayah West Bank, Palestina, berkat aksi normalisasi hubungannya dengan UEA. Uni Emirat Arab kemudian menjadi negara Arab ketiga yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Pada 15 September 2020, perwakilan dari kedua negara bertemu di White House, Amerika Serikat untuk melakukan penandatanganan perjanjian dalam rangka meresmikan hubungan baru mereka (AA, 2021). Dalam hal ini, Israel diwakilkan oleh Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri, dan Uni Emirat Arab diwakilkan oleh Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan selaku Menteri Luar Negeri dan saudara dari Putra Mahkota UEA, Mohammad Bin Zayed (Al Jazeera, 2020).

### *Kepentingan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab*

Sebelum mengkalkulasi rasionalitas dari kebijakan UEA, perlu dicari terlebih dahulu kepentingan nasional atau *goals and objectives*-nya. Adapun, kepentingan nasional akan dibagi menjadi tiga sektor, yaitu: keamanan, ekonomi, dan politik internasional.

#### **1. Kepentingan Keamanan**

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ialah karena keamanan. Dalam konteks ini, Uni Emirat Arab mendapatkan ancaman hebat dari Iran dan gerakan politik Islam.

Hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dengan Iran kerap diramaikan dengan sejumlah konflik geopolitik. Salah satunya adalah perebutan tiga pulau di Teluk Persia, yaitu: pulau Abu Musa, pulau Greater Tunb, dan pulau Lesser Tunb (Sadjadpour, 2011). Iran dan UEA sama-sama meng-klaim bahwa pulau tersebut adalah miliknya. Adapun, ketiga pulau ini diperebutkan karena memiliki fungsi dan lokasi yang strategis. Diketahui bahwa ketiga pulau tersebut berlokasi dekat dengan Selat Hormuz, yang mana merupakan jalur transportasi untuk 40% pasokan minyak global (Atalayar, 2020). Dengan kata lain, ketiga pulau ini berfungsi sebagai pusat kontrol lalu lintas maritim suplai minyak dunia. Sehingga, kepemilikan atas ketiga pulau tersebut dianggap krusial, dikarenakan mampu mempengaruhi kestabilan politik dan ekonomi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran sudah meningkatkan kehadiran dan aktivitas nya di pulau tersebut, dengan cara menggunakannya sebagai basis militer untuk menyerang kapal-kapal tanker milik UEA yang melewati jalur tersebut.

Selain konflik di atas, Iran juga sedang membangun jaringan militan proksi di penjuru Timur Tengah, yang mana mayoritasnya merupakan organisasi Politik Islam bersenjata. Hadirnya berbagai organisasi tersebut kemudian menjadi ancaman bagi keamanan serta politik domestik Uni Emirat Arab, karena memiliki motif untuk menggulingkan pemerintahan setempat. Sebagai contoh, kelompok Hezbollah di Lebanon, telah berhasil menggantikan peran pemerintah serta angkatan bersenjata Lebanon, dan mengatur kegiatan politik luar negeri Lebanon, seperti: melakukan perdagangan senjata lintas negara dan mengirim pasukan ke Suriah serta Israel (The Jerusalem Post, 2022). Kelompok Houthis di Yemen juga melakukan hal yang serupa, dimana ia berhasil mengambil alih ibukota Yemen, dan memanfaatkan posisinya untuk mengirim berbagai serangan ke infrastruktur Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Israel (The Jerusalem Post, 2022). Diketahui bahwa, Uni Emirat Arab juga kerap mendapatkan ancaman dari kelompok-kelompok tersebut. Sebagai contoh, pada 17 Januari 2022, kelompok Houthis melakukan serangan pesawat tak berawak dan rudal di Abu Dhabi yang menewaskan tiga orang di fasilitas perusahaan minyak negara, ADNOC (CNBC, 2022). Oleh karena itu, kelompok-kelompok ini tidak hanya sekedar menunjukkan aksi pemberontakan, namun juga menanamkan ancaman hebat terhadap

kestabilan kawasan Timur Tengah, dikarenakan kapasitasnya yang mampu melengserkan pemerintah setempat dan menjalankan kepentingannya tersendiri.

Adanya potensi Iran untuk kembali mengikuti perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) juga menjadi salah satu faktor yang mengancam keamanan Uni Emirat Arab. Lantaran, adanya potensi akan terjadinya pengaliran dana kepada Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) maupun kelompok-kelompok proksi Iran di Timur Tengah. Adapun, pengaliran dana tersebut kemungkinan besar akan digunakan untuk pembelian senjata yang dapat mengancam keamanan negara-negara Teluk. Hal ini kemudian diperburuk dengan letak geografis Uni Emirat Arab yang berseberangan langsung dengan Iran, sehingga meningkatkan adanya potensi serangan tersebut.

Selain Iran, Uni Emirat Arab juga mendapatkan potensi ancaman dari gerakan politik Islam. Salah satu dari gerakan politik Islam tersebut adalah al-Islah yang berafiliasi erat dengan the Muslim Brotherhood di Mesir. Dalam konteks ini, sejak tahun 2014, pemerintah Uni Emirat Arab telah mengkategorikan al-Islah sebagai salah satu dari 83 kelompok terorisme (Counter Extremism Project, 2022). Keputusan ini dilatarbelakangi oleh sejumlah aktivitas al-Islah yang mengarah ke gerakan-gerakan pemberontakan, dengan objektif utama berupa menciptakan negara Islam supranasional bersama dengan kelompok Muslim Brotherhood lainnya di Timur Tengah (Ibish, 2017). Spesifiknya, kelompok al-Islah telah berkomunikasi dengan entitas internasional untuk menumbangkan negara, berkomunikasi dengan the Muslim Brotherhood internasional untuk merebut kekuasaan, dan menginvestasikan dana amal dalam pendirian perusahaan komersial (The National News, 2012). Tidak hanya itu, sejumlah anggota al-Islah yang ditahan mengungkapkan bahwa mereka telah membentuk sayap militer untuk merebut kekuasaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa gerakan politik islam seperti al-Islah telah mengancam elemen *survival* dari kedualatan Uni Emirat Arab, dan memposisikan negaranya dalam kondisi yang rentan.

Terakhir, Uni Emirat Arab diketahui telah meningkatkan aktivitasnya di Perang Yaman untuk mengamankan jalur maritimnya, selat Bab el Mandeb. Hal ini dilakukan Uni Emirat Arab dengan cara berinvestasi secara politik, sosial dan melaksanakan

pembangunan ekonomi di provinsi selatan Yaman (Australian Institute of International Affairs, 2017). Dalam hal ini, Uni Emirat Arab memberdayakan gerakan Southern Transitional Council (STC), sebuah gerakan separatis yang menentang pemerintahan Abdrabbuh Mansour Hadi. Hal ini dilakukan UEA dengan cara mensponsori kegiatan mereka, baik dalam segi finansial, militer, maupun politik (Daily Sabah, 2020). Akhirnya, UEA melalui DP world dapat mengoperasikan pelabuhan Aden, yang mana dikuasai oleh gerakan STC. Pengoperasian pelabuhan Aden ini memungkinkan Uni Emirat Arab untuk mengontrol selat Bab-El Mandeb, yaitu rute maritim penting yang digunakan untuk mengangkut berbagai sumber daya antara Eropa, Afrika Timur, dan Asia (Australian Institute of International Affairs, 2017). Dalam konteks ini, rute tersebut sering mendapat gangguan dari jaringan militan proksi Iran, kelompok Houthis. Pada tahun 2016, sebuah rudal anti-kapal telah menyerang *the swift*, yaitu sebuah kapal berkecepatan tinggi milik UEA (The Washington Institute for Near East Policy, 2016). Serangan yang sama juga dilakukan terhadap kapal tanker minyak milik Arab Saudi pada awal tahun 2022 (Gulf News, 2022).

## 2. Kepentingan Ekonomi

Uni Emirat Arab merupakan negara yang berukuran cukup kecil secara geografis, dan memiliki total populasi hanya sebesar 10 juta penduduk per-2020 (World Population Review, 2022). Adapun, mayoritas penduduknya merupakan ekspatriat atau warga negara asing dengan komposisi berupa: Asia Selatan (58%), Asia (17%), Negara-negara Barat (8,5%) (World Population Review, 2022). Sedangkan, hanya sebesar 10% dari total populasi yang merupakan warga negara asli Uni Emirat Arab. Oleh karena itu, terbatasnya jumlah populasi menjadi tantangan terbesar Uni Emirat Arab dalam menjamin kesejahteraan ekonominya. Dalam konteks ini, Uni Emirat Arab harus merumuskan strategi jangka panjang, spesifiknya seperti: pembangunan ekonomi yang sistematis dan pengembangan sumber daya manusia. Cara ini menjadi salah satu solusi untuk menjamin perekonomian yang stabil dan sejahtera bagi masyarakat Uni Emirat Arab. Adapun, aksi normalisasi dengan Israel berpotensi untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan, Israel memiliki tingkat perekonomian dan sumber daya

manusia yang sangat baik di kawasan. Diketahui, bahwa perekonomian Israel termasuk di antara 20 ekonomi global teratas dalam PDB per kapita (Forbes Israel, 2021). Sehingga Israel dianggap sebagai *partner* yang strategis untuk UEA.

### 3. Kepentingan Politik Internasional

Dalam satu dekade terakhir, MBZ memiliki sebuah ambisi untuk menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara adidaya di kawasan Timur Tengah (The New York Times, 2020). Hal ini dipengaruhi oleh situasi regional yang kacau akibat Arab Spring pada tahun 2011. MBZ berpendapat bahwa :“negara yang tidak menginvasi, maka akan diinvasi” - dan opini inilah yang kemudian mendorong lahirnya sejumlah strategi jangka panjang Uni Emirat Arab dalam rangka mengantisipasi hadirnya gejolak Arab Spring pada wilayahnya (The Washington Institute, 2020b). Dalam konteks ini, MBZ berupaya untuk membangun sebuah negara yang dapat berdiri di atas kedua kakinya sendiri, dimulai dengan pengembangan angkatan bersenjata yang kuat dan dilatih dengan standar tertinggi, serta dengan lokalisasi industri pertahanan Emirat. Kegiatan normalisasi antara UEA dengan Israel dianggap berpotensi untuk mencapai ambisi MBZ. Pasalnya, dengan menyepakati normalisasi hubungan dengan Israel, maka mampu meningkatkan kepercayaan serta kredibilitas Uni Emirat Arab di sistem internasional, sebagai negara yang berintegritas dan mampu bekerja secara kolektif untuk kebaikan bersama.

## *Kalkulasi Rasionalitas Kebijakan Normalisasi Uni Emirat Arab dengan Israel*

### 1. *Goals and Objectives*

Setelah menjabarkan faktor-faktor di atas, penulis dapat mensimplifikasi bahwa kepentingan nasional UEA adalah:

- a. Meningkatkan sektor pertahanan dan keamanannya dari Iran
- b. Menjaga kestabilan perekonomian
- c. Memperkuat posisinya di sistem internasional

## 2. *Alternatives and Consequences*

Dalam rangka mengetahui rasionalitas dari keputusan Uni Emirat Arab, maka penulis telah merumuskan dua opsi kebijakan alternatif yang berpotensi untuk menjangkau *goals and objectives* dari Uni Emirat Arab. Opsi kebijakan yang pertama adalah “Melakukan aksi normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020”, dan yang kedua adalah “Menolak rencana Amerika Serikat untuk melakukan aksi normalisasi hubungan dengan Israel”.

### ***Pilihan 1: Melakukan aksi normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020***

Dengan diresmikannya hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dengan Israel pada bulan Agustus 2020, maka UEA memiliki peluang besar untuk meningkatkan sektor pertahanannya melalui serangkaian kerjasama berbasis keamanan bersama Israel. Berdasarkan laporan dari Breaking Defense, UEA berminat untuk membeli versi unggul dari radar Green Pine, yaitu bagian dari sistem Arrow Israel yang dirancang untuk mencegah rudal balistik (Breaking Defense, 2022). Jika penjualan akan sistem radar tersebut disetujui, maka mampu membantu UEA dalam mengantisipasi serangan misil udara dari Iran yang kerap dilakukannya dalam beberapa waktu ini. Selain penjualan sistem radar, sejumlah perusahaan Israel juga dikabarkan telah menjual teknologi siber dan peralatan militer lainnya ke UEA (Tehran Times, 2022). Selain penjualan sistem radar dan teknologi siber, Uni Emirat Arab juga telah mendapatkan izin dari Amerika Serikat untuk membeli jet Lockheed F-35 Lightning II dan drone MQ-9 Reaper jet F-35. Kepemilikan UEA atas sejumlah alutsista ini memungkinkan UEA untuk memiliki keunggulan militer di kawasan, terutama dalam menangkal serangan dari Iran.

Selain penjualan alutsista, aksi normalisasi tersebut juga menguntungkan Uni Emirat Arab dalam mengamankan jalur maritimnya di selat Bab el Mandeb. Diketahui bahwa, Israel dan UEA telah mencapai kesepakatan untuk berbagi kendali atas pulau Sokotra, dalam rangka memperluas operasi intelijen militer bersama mereka (Inside Arabia, 2021). Hal ini dijabarkan oleh ABNA, media Iran, bahwasanya Yayasan Khalifa

UEA dan The Red Crescent telah menandatangani kontrak dengan perusahaan Israel Yossi Abraham dan Mifram untuk memperluas bandara Hidaybu, yang digunakan UEA dan pasukan keamanan Israel untuk melakukan operasi intelijen angkatan laut dan udara (Ahlul Bayt News Agency, 2021). Hal ini kemudian menjadi keuntungan besar bagi Uni Emirat Arab, lantaran mampu meningkatkan pemantauannya pada jalur maritim tersebut melalui kehadiran dan dukungan materil dari Israel.

Di lain sisi, aksi normalisasi antara kedua negara ini juga memberikan keuntungan yang maksimal pada sektor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kesepakatan terkini antara Uni Emirat Arab dengan Israel yang memungkinkan 95% dari produk yang diperdagangkan bersifat bebas bea cukai atau dengan kata lain merupakan perjanjian perdagangan bebas (Reuters, 2022). Kesepakatan yang dikenal dengan *the Milestone Deal* ini meminimalisir hambatan pada kegiatan ekspor-impor antara kedua negara, yaitu dengan mengurangi atau menghapus tarif pada berbagai produk, meningkatkan akses pasar untuk layanan, dan mempromosikan arus investasi (Reuters, 2022). Selain itu, perjanjian ini juga akan meningkatkan jumlah lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi secara signifikan.

Selain perjanjian perdagangan bebas, Uni Emirat Arab beserta Israel juga telah menandatangani kesepakatan investasi senilai \$10 miliar. Pada bulan Maret 2021, Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa ia telah menyiapkan dana investasi sebesar \$10 miliar yang ditujukan untuk sektor-sektor strategis di Israel (The Arab Weekly, 2021). Kesepakatan investasi ini kemudian memungkinkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara dan mendorong kemajuan *progress* sosial-ekonomi, sebagaimana dituangkan pada perjanjian Abraham Accords.

Di lain sisi, aksi normalisasi tersebut juga membawa keuntungan berupa penundaan akan wacana aneksasi atau ekspansi wilayah West Bank, Palestina, oleh Israel (The Guardian, 2020b). Diketahui bahwa Uni Emirat Arab hanya akan menyepakati rencana normalisasi tersebut, apabila Israel sepakat untuk menunda atau menghentikan secara penuh wacananya untuk melakukan ekspansi resmi terhadap wilayah West Bank, Palestina. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Yousef Al Otaiba, Duta Besar Uni

Emirat Arab untuk Amerika Serikat, pada salah satu media Israel yang cukup terkenal, *Yedioth Ahronoth*, bahwasanya: “*Annexation will certainly and immediately upend Israeli aspirations for improved security, economic and cultural ties with the Arab world and with UAE*” (Middle East Policy Council, 2020). Keberhasilan diplomasi Uni Emirat Arab untuk menunda wacana ekspansi tersebut, telah memperkuat posisinya di sistem internasional. Pasalnya, kegiatan aneksasi akan wilayah West Bank, Palestina akan merusak upaya sistem internasional yang telah lama mengusung *two-state solution* sebagai solusi atas isu Palestina-Israel (The Guardian, 2020a). Tidak hanya itu, kegiatan aneksasi tersebut juga dianggap sebagai pelanggaran akan sejumlah hukum internasional yang berlaku, dan akan memberikan implikasi hebat terhadap hak asasi manusia para warga Palestina (Amnesty International, 2020).

Di lain sisi, aksi normalisasi tersebut juga membawa sejumlah kerugian, yang mana salah satunya adalah hilangnya rasa kepercayaan Palestina terhadap Uni Emirat Arab. Seperti yang kita ketahui, negara-negara Arab terkenal akan solidaritasnya yang selalu membela rakyat Palestina. Hal ini bahkan dituangkan dalam sebuah resolusi konflik, yaitu Arab Peace Initiative pada tahun 2002. Dalam perjanjian tersebut, tertulis bahwa 22 negara anggota Liga Arab tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, hingga Israel setuju untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang direbut sejak 1967 (al Jazeera, 2020a). Hari ini, Uni Emirat Arab justru membalik resolusi tersebut dengan melakukan normalisasi terlebih dahulu untuk mencegah rencana aneksasi Israel. Hal ini tentunya mengecewakan masyarakat Palestina, dan dianggap sebagai aksi pengkhianatan. Mahmoud Abbas, selaku presiden Palestina menyatakan bahwa kepemimpinan Palestina menolak dan mengecam keputusan UEA tersebut. Selain Palestina, sejumlah negara muslim juga mengekspresikan kekecawaannya terhadap keputusan Uni Emirat Arab untuk melakukan aksi normalisasi dengan Israel. Salah satunya adalah Iran, yang mana mengecam kesepakatan tersebut sebagai "kesalahan besar", lantaran dianggap telah menyalahnyakan perjuangan masyarakat muslim di seluruh dunia yang menginginkan akan wilayah Palestina yang merdeka (al Jazeera, 2020b). Hal serupa juga diutarakan oleh Turki yang menganggap bahwa UEA adalah sosok yang hipokrit. Sejumlah kekecawaan ini kemudian berujung pada *branding image*

yang kurang baik, terutama dalam konteks Uni Emirat Arab sebagai sesama negara muslim.

***Pilihan 2: Menolak rencana Amerika Serikat untuk melakukan aksi normalisasi hubungan dengan Israel***

Salah satu keuntungan yang akan diperoleh oleh Uni Emirat Arab, adalah pembangunan *image* yang positif di antara negara-negara muslim. Dalam konteks ini, penolakan Uni Emirat Arab terhadap rencana yang ditawarkan oleh Amerika Serikat akan mendemonstrasikan integritas dan komitmen kuat dari Uni Emirat Arab untuk tetap mematuhi Arab Peace Initiative tahun 2002.

Di lain sisi, penolakan akan rencana normalisasi tersebut akan membawa kerugian berupa ketidakberhasilan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat telah sepakat untuk memberikan izin atas penjualan jet tempur F-35 dan sejumlah alat pertahanan lainnya apabila Uni Emirat Arab sepakat untuk melakukan aksi normalisasi tersebut. Adapun kepemilikan jet tempur F-35 dan sejumlah alat pertahanan tersebut akan bermanfaat untuk meningkatkan sektor pertahanan Uni Emirat Arab terhadap serangan dari Iran. Dengan demikian, penolakan atas rencana normalisasi yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, akan berujung pada ketidakberhasilan Uni Emirat Arab dalam menjangkau *goals and objectives*-nya yaitu meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan dari Iran.

3. *Choice*

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa opsi kebijakan melakukan aksi normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020, adalah kebijakan paling rasional. Hal ini dikarenakan, kebijakan tersebut mampu menjangkau semua *goals and objectives* yang diinginkan oleh Uni Emirat Arab. Dalam konteks ini, Uni Emirat Arab mampu meningkatkan sektor pertahanan dan keamanannya dari Iran, melalui sejumlah senjata dan teknologi siber yang diperolehnya dari Israel. Tidak hanya itu, melalui aksi normalisasi, Uni Emirat Arab juga telah mendapatkan izin untuk membeli jet tempur F-35 dan sejumlah alat pertahanan lainnya, yang mana akan sangat

bermanfaat untuk kegiatan intelijen Uni Emirat Arab. Selain itu, aksi normalisasi ini juga telah memungkinkan Uni Emirat Arab untuk mengamankan jalur perdagangan maritimnya melalui operasi intelijen militer bersama yang dilaksanakan dengan Israel di pulau Sokotra. Sedangkan, pada sektor ekonomi, aksi normalisasi tersebut memungkinkan Uni Emirat Arab untuk mampu menjaga kestabilan perekonomiannya dengan cara melaksanakan sejumlah kerjasama berbasis perdagangan bebas dan investasi dengan Israel. Terakhir, Uni Emirat Arab mampu memperkuat posisinya di sistem internasional, karena telah berhasil memuat penundaan wacana ekspansi wilayah West Bank, Palestina di dalam kesepakatan Abraham Accords tersebut, yang mana ditentang oleh seluruh entitas internasional.

Di lain sisi, opsi kebijakan untuk menolak rencana Amerika Serikat untuk melakukan aksi normalisasi hubungan dengan Israel tersebut bukanlah pilihan yang rasional, karena tidak mampu memenuhi *goals and objectives* dari Uni Emirat Arab. Di sini, Uni Emirat Arab hanya akan memperoleh keuntungan berupa pembangunan *image* yang positif di antara sesama negara muslim. Keuntungan ini kemudian tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan apabila Uni Emirat Arab sepakat untuk melakukan aksi normalisasi dengan Israel. Terlebih, penolakan akan rencana normalisasi ini justru akan menggagalkan keinginan Uni Emirat Arab untuk meningkatkan pertahanan dan keamanannya dari Iran, lantaran tidak akan mendapatkan izin dari Amerika Serikat untuk memiliki jet tempur F-35 dan sejumlah alat pertahanan lainnya. Dengan demikian, keputusan Uni Emirat Arab untuk melakukan aksi normalisasi dengan Israel di tahun 2020 adalah karena aksi normalisasi tersebut akan membawa sejumlah *benefits* yang mampu mengamankan dan menjangkau kepentingan nasionalnya.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis menggunakan Model Akor Rasional, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 adalah kebijakan yang rasional, karena telah dipertimbangkan secara matang dan terukur berdasarkan faktor-faktor tertentu, yaitu: keamanan, ekonomi, dan politik internasional. Tidak hanya itu, rasionalitas dari kebijakan

ini juga dibuktikan dengan bagaimana kebijakan tersebut mampu memberikan sejumlah benefits yang menjangkau sejumlah kepentingan nasionalnya, yaitu: meningkatkan sektor pertahanan dan keamanannya dari Iran, menjaga kestabilan perekonomian, dan memperkuat posisinya di sistem internasional.

Keterbatasan dari penggunaan model aktor rasional adalah ketidakmampuan model ini mengkomodasi faktor dinamika politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan politik luar negeri. Padahal, normalisasi hubungan dengan Israel merupakan isu yang sangat menarik perhatian publik dalam negeri UEA yang selama ini cukup kuat mengekspresikan dukungan terhadap Palestina. Oleh karena diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam persoalan ini.

## Referensi

- AA. (2021, September 15). *UAE Embassy in Israel celebrates anniversary of normalization deal*. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/uae-embassy-in-israel-celebrates-anniversary-of-normalization-deal/2365319>
- Ahlul Bayt News Agency. (2021, September 18). *UAE occupation puts Socotra airport under Zionist administration*. [https://en.abna24.com/news/uae-occupation-puts-socotra-airport-under-zionist-administration\\_1180768.html](https://en.abna24.com/news/uae-occupation-puts-socotra-airport-under-zionist-administration_1180768.html)
- al Ittihad. (2008, March 5). *Mohamed bin Zayed: The security strategy responds to the requirements of Comprehensive Development*. <https://www.alittihad.ae/article/10531/2008/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF:-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9>
- al Jazeera. (2020a, March 28). *The Arab Peace Initiative | News | Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2010/3/28/the-arab-peace-initiative>

- al Jazeera. (2020b, August 15). *How the world reacted to UAE, Israel normalising diplomatic ties* | Conflict News | Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2020/8/15/how-the-world-reacted-to-uae-israel-normalising-diplomatic-ties>
- al Jazeera. (2020c, September 8). *Israel, UAE to sign deal at White House on September 15: Reports* | Donald Trump News | Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2020/9/8/israel-uae-to-sign-deal-at-white-house-on-september-15-reports>
- Allison, G. (1971). *The Essence of Decision Making*. Little Brown & Company.
- AMN News. (2020, August 13). *Further Israeli annexation of Palestinian territories would have eliminated hope for peace: UAE*. <https://www.almasdarnews.com/article/further-israeli-annexation-of-palestinian-territories-would-have-eliminated-hope-for-peace-uae/>
- Amnesty International. (2020, July 2). *Israel/OPT: 10 things you need to know about "annexation"* - Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/israelopt-10-things-you-need-to-know-about-annexation/>
- Atalayar. (2020, October 6). *Iran warns UAE over disputed islands near Strait of Hormuz* | Atalayar - Las claves del mundo en tus manos. <https://atalayar.com/en/content/iran-warns-uae-over-disputed-islands-near-strait-hormuz>
- Australian Institute of International Affairs. (2017). *The UAE's Geostrategic Plans in Yemen and the Gulf of Aden* - AIIA - Australian Institute of International Affairs. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-uaes-geostrategic-plans-in-yemen-and-the-gulf-of-aden/>
- Axios. (2020, February 5). *Scoop: Israel and UAE discuss anti-Iran cooperation at secret White House meeting*. <https://www.axios.com/israel-uae-white-house-meeting-iran-trump-kushner-ec81aa24-02db-4920-b4f2-88eec301222c.html>
- Breaking Defense. (2022, February 1). *UAE, reeling from Houthi attacks, seeking Israeli advanced radar: Sources* - Breaking Defense. <https://breakingdefense.com/2022/02/uae-reeling-from-houthi-attacks-seeking-israeli-advanced-radar-sources/>
- CNBC. (2022, February 11). *Attacks on UAE shows its strengths more than vulnerabilities: Analysts*. <https://www.cnn.com/2022/02/11/attacks-on-uae-shows-its-strengths-more-than-vulnerabilities-analysts.html>
- Counter Extremism Project. (2022). *MUSLIM BROTHERHOOD IN THE UNITED ARAB EMIRATES*. <http://www.thenational.ae/news/uae-news/brotherhood-sought-islamist-state-in-uae;>
- Daily Sabah. (2020, June 16). *UAE presence in Yemen undermines legitimate Hadi government* | Opinion. <https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/uae-presence-in-yemen-undermines-legitimate-hadi-government>

- Forbes Israel. (2021, May 5). *Israel is among the top 20 global economies in GDP per capita for the first time - Forbes Israel*. <https://forbes.co.il/e/israel-is-among-the-top-20-global-economies-in-gdp-per-capita-for-the-first-time/>
- Global Media Insight. (2021, July 1). *UAE Population Statistics 2021 (Infographics) | Dubai Population [Expat+By Country+By Nationality+Demographics]*. <https://www.globalmediainsight.com/blog/uae-population-statistics/>
- Gulf News. (2022, March 24). *UAE 'strongly condemns' Houthi attempts to target oil tankers in Red Sea | Government - Gulf News*. <https://gulfnews.com/uae/government/uae-strongly-condemns-houthi-attempts-to-target-oil-tankers-in-red-sea-1.1648144430888>
- Haaretz. (2013, June 11). *Israel selling military wares to Mideast countries, Britain says - Haaretz Com - Haaretz.com*. <https://www.haaretz.com/.premium-israel-selling-arms-to-muslim-countries-1.5277220>
- Ibish, H. (2017). *The UAE's Evolving National Security Strategy*. [www.agsiw.org](http://www.agsiw.org).
- Inside Arabia. (2021, October 5). *UAE-Israeli Annexation of Socotra is Most Significant Since 1967*. <https://insidearabia.com/uae-israeli-annexation-of-socotra-is-most-significant-me-occupation-since-1967/>
- Jewish Virtual Library. (2022). *Israel-UAE Relations*. <https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-uae-relations>
- Middle East Eye. (2016, January 19). *Israel eyes improved ties with Gulf states after 'foothold' gained in UAE | Middle East Eye*. <https://www.middleeasteye.net/news/israel-eyes-improved-ties-gulf-states-after-foothold-gained-uae>
- Middle East Policy Council. (2020, June 25). *UAE Ambassador to the U.S. Yousef Al-Otaiba's Warning Against Israeli Annexation Plans | Middle East Policy Council*. <https://mepc.org/commentary/uae-ambassador-us-yousef-al-otaibas-warning-against-israeli-annexation-plans>
- Reuters. (2022, April 1). *Israel, UAE finalise "milestone" free trade deal | Reuters*. <https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-says-uae-free-trade-deal-reached-2022-04-01/>
- Sadjadpour, K. (2011). *THE BATTLE OF DUBAI*. [www.CarnegieEndowment.org/pubs](http://www.CarnegieEndowment.org/pubs).
- Tahmi, A.R, Rosyidin, M., dan M. F. Alfian. 2022. "Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel," *Journal of International Relations*, vol. 8, no. 3, pp. 325-333, Jun. 2022
- Tehran Times. (2022, February 6). *UAE and Israel expanding "security cooperation" - Tehran Times*. <https://www.tehrantimes.com/news/469872/UAE-and-Israel-expanding-security-cooperation>
- The Arab Weekly. (2021, March 12). *UAE announces \$10 billion fund for Israel investments | | AW*. <https://theArabweekly.com/uae-announces-10-billion-fund-israel-investments>

- The Guardian. (2020a, June 9). *What would Israel annexing the West Bank mean? | Israel | The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/what-would-israel-annexing-the-west-bank-mean>
- The Guardian. (2020b, August 13). *Israel signs historic deal with UAE that will “suspend” West Bank annexation | Palestinian territories | The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2020/aug/13/israel-and-uae-to-form-diplomatic-ties-says-donald-trump>
- The Jerusalem Post. (2016, November 4). *Report: Israel’s UN ambassador made secret visit to Dubai - The Jerusalem Post*. <https://www.jpost.com/israel-news/report-israels-un-ambassador-made-secret-visit-to-dubai-471664>
- The Jerusalem Post. (2022, January 9). *Iran and its proxies are emboldened by lack of accountability - analysis - The Jerusalem Post*. <https://www.jpost.com/middle-east/article-691955>
- The National News. (2012, September 21). *Brotherhood “sought Islamist state in UAE.”* <https://www.thenationalnews.com/uae/brotherhood-sought-islamist-state-in-uae-1.576627/>
- The Times of Israel. (2018, October 30). *Likud minister calls for “peace and security” at Dubai conference | The Times of Israel*. <https://www.timesofisrael.com/likud-minister-calls-for-peace-and-security-at-dubai-conference/>
- The Washington Institute. (2015, November 30). *Israel’s Gulf Breakthrough | The Washington Institute*. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/israels-gulf-breakthrough>
- The Washington Institute. (2022, May 16). *De Facto Becomes De Jure as MbZ Is Named UAE President | The Washington Institute*. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/de-facto-becomes-de-jure-mbz-named-uae-president>
- The Washington Institute for Near East Policy. (2016, October 6). *Houthi Antishipping Attacks in the Bab al-Mandab Strait | The Washington Institute*. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/houthi-antishipping-attacks-bab-al-mandab-strait>
- United States Institute of Peace. (2020, August 14). *What Do Normalized Israel-UAE Relations Mean for the Region? | United States Institute of Peace*. <https://www.usip.org/publications/2020/08/what-do-normalized-israel-uae-relations-mean-region>
- Wicaksono, R. M. T. A. (2020). The Normalization of UAE-Israel Relations. *Jurnal ICMES*, 4(2), 171-194.
- World Population Review. (2022). *United Arab Emirates Population 2022 (Demographics, Maps, Graphs)*. <https://worldpopulationreview.com/countries/united-arab-emirates-population>
- Zaga, M. (2018). *Israel and the United Arab Emirates: Opportunities on Hold*.